

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SAEWE KECAMATAN GUNUNGSITOLI

by Kartini Lase

Submission date: 25-Sep-2023 01:11AM (UTC-0400)

Submission ID: 2176096230

File name: KARTINI_LASE.docx (298.92K)

Word count: 11467

Character count: 73140

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA
SAEWE KECAMATAN GUNUNGSITOLI**

RANCANGAN PENELITIAN



Diajukan dalam
Forum Seminar Rancangan Penelitian

Oleh
KARTINI LASE
NIM 2319273

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS
2023**

LEMBARAN PERETUJUAN RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan Penelitian yang diajukan oleh:

Nama : KARTINI LASE

NIM : 2319273

Program : Sarjana

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI
DESA SAEWE KECAMATAN GUNUNGSITOLI**

telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Gunungsitoli, 2023

Ketua Program Studi Manajemen

Dosen Pembimbing

Yupiter Mendrofa, S.E., M.M
NIDN. 0112078103

Aferiaman Telaumbanua.S.E.,M.M.
NIDN. 0116047202

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatnya, penelitian ini dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli”.

Dalam penulisan proposal penelitian ini banyak sekali kendala yang dihadapi oleh peneliti, namun peneliti dapat melewatinya dengan baik karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus serta semua orang disekitar penelitian yang telah memotivasi dan mendukung peneliti menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. **Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., MS.Si** selaku Rektor Universitas Nias
2. **Ibu Maria Magdalena Bate’e, SE., M.M** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias
3. **Bapak Aferiaman Telaumbanua, S.E.M.M** sebagai Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini.
4. **Bapak Yupiter Mendrofa, SE., M.M** selaku Ketua Prodi Fakultas Ekonomi Universitas Nias
5. Orang tua peneliti dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan proposal penelitian ini
6. Semua teman-teman kampus, yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti

Dalam penelitian kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun demi terciptanya penelitian yang lebih baik serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Gunungsitoli, Agustus 2023

KARTINI LASE
NPM.2319273

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERETUJUAN MELAKSANAKAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
1.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kinerja Keuangan	6
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	8
2.3 Analisis Kinerja Keuangan Desa	11
2.4 Penelitian Terdahulu	13
2.5 Kerangka Pikir	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Variabel Penelitian	17
3.3 Populasi dan Sampel	17
3.4 Instrumen Penelitian	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data	18
3.6 Teknik Analisis Data	19
3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	19
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Presentase Kinerja Efektivitas Keuangan	12
Tabel 2.2 Kriteria Pengukuran Efisiensi	13
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2023	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Good governance menurut Diah 2020 adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan institusi dimana interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta mempengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial dan publik. Oleh karena itu *good governance* sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan institusi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi dengan seluruh sektor publik.

Sifat *good governance* tersebut bila diterapkan, dapat membantu organisasi sektor publik menjalankan dan memimpin pemerintahan serta membuat pemerintahan bertanggung jawab kepada publik atas kinerjanya. Menurut Eka Fitri & Yulistia (2020), penilaian kinerja pemerintah adalah :

Penilaian kinerja pemerintah didasarkan pada *value for money*, dimana diharapkan anggaran yang dikelola tersebut dapat dibelanjakan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan efektifitas. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). sedangkan suatu organisasi, program atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan (*spending wisely*).

Menurut Nurlan Darise dalam Gramini, et. al, (2017). “kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bagian keuangan yang meliputi penerimaan dan belanja desa dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan yang berlaku selama satu periode anggaran”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara umum menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah meliputi seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan pada periode tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa mempunyai kewenangan tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD (Pelaksanaan Teknik Pengelolaan keuangan desa). PTPKD sendiri terdiri dari kepala seksi, bendahara desa, dan sekretaris desa.

Pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 113 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa APBDes meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan desa adalah seluruh penerimaan yang berasal dari rekening desa yang menjadi hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran.

pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer dari daerah atau pusat dan pendapatan lain lain. belanja desa adalah seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh desa melalui rekening desa dan merupakan kewajiban setiap desa untuk jangka waktu satu tahun. pembiayaan desa mencakup seluruh penerimaan yang harus di bayarkan kembali atau semua pengeluaran yang harus di terima kembali.

Pengelolaan keuangan desa yang baik menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik, namun tidak semua pemerintah desa menjalankan dan mempertanggung jawabkan hasil keuangannya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang kurang percaya atas hasil kerja yang di lakukan oleh pemerintah desa sehingga timbullah dugaan-dugaan masyarakat yang menyatakan pihak desa telah melakukan penyimpangan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk keperluan pribadi.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dimana masyarakat desa melayangkan surat pengaduan

kepada Komisi I DPRD kota Gunungsitoli mengenai bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan spesifikasi yang mana, masyarakat menduga pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi karena dana desa tersebut di gunakan untuk keperluan lain. oleh sebab itu, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi di kemudian hari, perlu diketahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan pendapatan dana desa dengan cara menganalisis kinerja keuangannya.

Analisis kinerja keuangan ini penting karena dapat menunjukkan tercapainya tujuan kinerja keuangan yang telah di tetapkan, dapat menjadi pedoman di masa depan dalam pengambilan keputusan, dapat menjadi perbandingan antara kinerja keuangan dari tahun ke tahun, dan dapat menjadi bukti nyata kepada masyarakat agar masyarakat tidak berasumsi buruk terhadap pemerintahan desa. dalam menganalisis kinerja keuangan, rasio merupakan alat analisis yang harus di gunakan untuk menilai baik/buruknya kinerja keuangan.

Di ketahui bahwa pada organisasi komersial, penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan telah banyak di terapkan, namun pada organisasi publik khususnya pemerintah desa penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan masih sangat terbatas, karena sampai dengan saat ini penyusunan APBDes di lakukan berdasarkan pertimbangan anggaran tradisional sehingga sering kali mengabaikan rasio keuangan dalam APBDesnya.

Serta keterbatasan pelaporan keuangan pada badan pemerintah desa yang berbeda ruang lingkup dan sifatnya dengan pelaporan keuangan pada badan usaha komersial, serta penilaian keberhasilan APBDes lebih terfokus pada pencapaian tujuan sehingga tidak memperhatikan perubahan posisi pada struktur APBDesnya.

Maka berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan peneliti yang di identifikasikan diantaranya:

- a. Akibat ketidakpercayaan kepada pemerintahan desa, Timbullah dugaan-dugaan masyarakat yang menyatakan pihak desa telah melakukan penyimpangan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk keperluan pribadinya.
- b. Adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga masyarakat desa melakukan pengaduan kepada komisis I DPRD kota gunungsitoli.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menetapkan batasan masalah hanya berfokus pada:

- a. Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja Desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli
- b. Dengan menggunakan alat analisis rasio keuangan daerah yaitu rasio efektifitas dan rasio efesiensi periode tahun 2019-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka pokok permasalahan yang akan di bahas yaitu; **Bagaimanakah kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli?**

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya kinerja keuangan khususnya dalam segi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- b. Bagi objek penelitian, sebagai bahan kepada masyarakat untuk mengetahui seberapa baik atau buruknya kinerja anggaran pendapatan dan belanja desa
- c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias, sebagai bahan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan ilmu manajemen khususnya dalam menilai kinerja keuangan.
- d. Bagi peneliti lanjutan, Sebagai bahan referensi penelitian dan pengalaman dalam kajian keilmuan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mensistematika penulisan Tugas Akhir ini maka hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diatur dan disusun berdasarkan urutan-urutan pengkajian sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan dari Tugas Akhir yang menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian yang akan mengemukakan tentang beberapa teori-teori yang berhubungan langsung dengan penelitian sebagai dasar/pedoman pembahasan dan pengkajian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran tentang kegiatan penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Di dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan kinerja keuangan merupakan sesuatu hal yang harus di ketahui oleh pihak tertentu secara terbuka agar dapat meninjau seberapa besar hasil atau capaian yang telah di dapatkan.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (Kusumadiyanto,2006:33) dalam (Ester, 2018) “kinerja merupakan sesuatu yang dicapai/prestasi yang diperlihatkan /kemampuan kerja”. Sedangkan Menurut Kasmir (2019:184) dalam (Deni & Diah, 2021) kinerja adalah “ hasil kerja dan perilaku kerja yang telah di capai dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang diberikan selama periode waktu tertentu”.

Berbeda pula dengan pendapat Riyanto (201:345) dalam Ester (2018) yang mengatakan bahwa “ kinerja adalah kemampuan perusahaan dibidang keuangan yang dapat memberikan informasi tentang aliran dana baik datangnya dana maupun untuk apa dana itu digunakan”. Begitu juga dengan Mahsun (2013) dalam (Isnah & Novi 2022) mengatakan “ kinerja disebut sebagai penggambaran tingkat tercapainya penyelenggara program, aktivitas, dan kebijakan guna mewujudkan tujuan, visi, dan misi serta sasaran yang diharapkan”.

Menurut Irham (2014) dalam (Nico et al., 2019) kinerja keuangan adalah “ suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan program-programnya dengan menggunakan aturan-aturan pelaksana keuangan secara baik dan benar serta secara efektif dan efisien”.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah hasil/prestasi keuangan yang

telah didapatkan atau dicapai berdasarkan target yang telah ditentukan selama periode tertentu yang menggambarkan tingkat baik/buruknya kinerja keuangannya.

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Sebelum melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan tentunya perlu diketahui terlebih dahulu apa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan tersebut.

Menurut Sinambela (2012:187) dalam (Cristian et al., 2017) ada 3 tujuan dalam pengukuran kinerja yaitu: “ membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan”

Sedangkan menurut Bastian (2006) dalam (Desy et al., 2020) menyatakan bahwa tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni ”guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya aktual jika dibandingkan biaya dalam rencana anggaran”.

Indra Bastian (2001) dalam (Desy et al.,2020) “menyatakan ukuran untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran serta tujuan yang sudah di tetapkan adalah indikator kinerja yang berpedoman pada elemen indikator kinerja”.

Menurut Moeheriono 2014 dalam (M. Thoyib et al., 2020) ”Mendefenisikan bahwa indikator kinerja sebagai nilai yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* dari suatu program”

Ada beberapa indikator dalam pengukuran kinerja menurut Mardiasmo 2009 dalam (M. Thoyib et al., 2020) yaitu:

- a. Efisiensi, yaitu perbandingan dari *input* atau *output* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan
- b. Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut

Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja keuangan beserta indikator yang telah dipaparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengukuran kinerja keuangan sangatlah penting untuk mengetahui hal apa saja yang terjadi dalam bidang tersebut.

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Berikut ini ada beberapa manfaat dari pengukuran kinerja keuangan menurut Nurhayati (2019) diantaranya:

- a. Pengukuran kinerja keuangan dalam pengambilan keputusan
Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan sebagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada.
- b. Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas internal
Adanya pengukuran kinerja secara otomatis akan tercipta akuntabilitas diseluruh lini atau garis organisasi, dari lini teratas sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggung jawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar berdasarkan objek (*by objectives*) untuk mengukur hasil (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*).
- c. Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas publik
Pelaporan evaluasi kinerja keuangan organisasi kepada masyarakat disarankan, karena publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja keuangan yang baik.
- d. Pengukuran kinerja keuangan, perencanaan, dan penetapan tujuan.
Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang baik tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan dan kemampuan suatu program.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan salah satu aturan desa yang didalamnya terdapat sumber penerimaan dan juga pengeluaran desa selama satu tahun berjalan.

Menurut Herlianto (2017:19) dalam (Ahmad & Kismartini 2020) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) “ merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan APBDes yang baik perlu memperhatikan prinsip untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat”.

Menurut Wida (2017) anggaran pendapatan dan belanja desa “ merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 dalam (M. Thoyib et al., 2020) :

“Pendapatan desa merupakan semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer dari daerah atau pusat serta pendapatan lain lain. Belanja desa adalah semua pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa yang menjadi kewajiban bagi setiap desa dalam jangka waktu satu tahun periode. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu di bayarkan kembali atau semua pengeluaran yang akan di terima kembali.”

2.2.1 Pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa

1. Pendapatan

Menurut undang-undang no 06 tahun 2014 dalam Chabib & Heru (2014: 40) tentang desa, bab VIII tentang keuangan dan aset desa pasal 72 pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan asli desa
- b. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah
- d. usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi
- e. Alokasi dari APBN
- f. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- g. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan

2. Belanja

Menurut Chabib & Heru (2014: 22-23) Belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Belanja tidak langsung:
 - Belanja pegawai/penghasilan tetap
 - Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
 - Belanja tunjangan
 - Belanja subsidi
 - Belanja bantuan sosial
 - Belanja HIBAH

Belanja bantuan keungan dan
Belanja tidak terduga

- b. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur
 2. Belanja barang dan jasa seperti barang ATK, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dokumentasi), belanja cetak dan penggandaan, belanja kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas, dan juga belanja perjalanan dinas.
 3. belanja modal seperti, belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air, belanja modal pembangunan gedung, jalan jembatan dsb.

3. Pembiayaan

Menurut Chabib & Heru (2014: 23)

1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun yang lalu
 - Transfer dari dana cadangan
 - b. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - c. Penerimaan pinjaman desa dan
 - d. Penerimaan piutang desa
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyerahan modal/investasi
 - c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
 - d. Pemberian pinjaman

2.2.2 Pelaksanaan APBDes

Menurut Chabib & Heru (2014: 28) tentang Pelaksanaan APBDes

1. pelaksanaan anggaran pendapatan desa :
 - a. semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang di tunjuk
 - b. setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - c. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya
 - d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan.
2. Pelaksanaan anggaran belanja desa
 - a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa
 - b. bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam surat permintaan pembayaran (SPP).
 - c. sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disahkan. Selanjutnya kepala desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa pada bank yang dituju

- d. untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu diketahui oleh camat untuk selanjutnya camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan kepada kepala desa
- 2. pelaksanaan anggaran pembiayaan desa
 - a. sisa lebih perhitungannya anggaran (SILPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja
 - 2. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung
 - b. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas rekening dana cadangan pemerintah desa.

2.2.3 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Chabib & Heru (2014: 33-34) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu:

- a. Perubahan APBDes dilakukan apabila :
 - 1. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja.
 - 2. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
 - 3. adanya perubahan pendapatan dan belanja.
- b. Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun anggaran.
- c. Pergeseran antar kelompok belanja dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDes sedangkan pergeseran antar jenis belanja dilakukan dengan keputusan kepala desa dan di beritahukan kepada BPD.
- d. SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan anataralain untuk:
 - 1. mendanai dana belanja pegawai/ penghasilan tetap akibat adanya kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.
 - 2. mendanai kegiatan lanjutan.
 - 3. mendanai kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 4. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya di tingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dengan kriteria harus diselesaikan sampai batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berkenaan.

2.3 Analisis Kinerja Keuangan Desa

Dalam menganalisis kinerja keuangan desa dapat diketahui berdasarkan realisasi pendapatan dan anggaran. Jika, realisasi lebih dari anggaran yang ditentukan, maka kinerja pemerintah tersebut akan dinilai baik. Menurut (Ni Kadek & Gede 2022) analisis kinerja keuangan pemerintah desa “ merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja

pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu”.

Dalam melakukan analisis kinerja keuangan, salah satu alat analisis yang dapat digunakan adalah rasio keuangan daerah. Menurut Susanto dalam Ni Kadek & Gede (2022), “ penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi”

Berikut ini Rasio keuangan daerah yang digunakan yaitu:

a. Rasio efektivitas

Menurut Halim 2012 dalam (Azizah et al., 2021) rasio efektivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah. Pendapatan asli pada suatu daerah dapat dikatakan dengan kategori efektif jika hasil atau nilai yang dicapai 100 atau lebih dari 100%. Dalam hal demikian dapat ditarik simpulan bahwa semakin besar nilai suatu rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintahannya.

Rasio efektivitas dapat dilakukan pengukuran menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Presentase kinerja efektivitas keuangan

Presentase kinerja keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Azizah et al., 2021)

b. Rasio efisiensi

Menurut mardiasmo dalam (Azizah et al., 2021), “rasio efisiensi merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dengan melihat besarnya biaya yang direalisasikan dalam mengumpulkan pendapatan daerahnya yang selanjutnya akan dibandingkan dengan belanja daerahnya. Semakin kecil nilai dari rasio efisiensi akan berarti bahwa maka semakin baik pula kinerja pemerintah dalam suatu daerah”.

Rasio efisiensi dapat dilakukan pengukuran menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

5
Tabel 2.2 Kriteria pengukuran efisiensi

Kriteria efisiensi (%)	Presentasi efisiensi
>100%	Tidak efisien
90-100%	Kurang efisien
80-100%	Cukup efisien
60-80%	Efisiensi
≤60%	Sangat efisien

Sumber: kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Azizah et al., 2021)

2.4 Penelitian Terdahulu

1
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Puspawardani Wida (2017) Jurnal Dinamika vol 4 No. 1	Pngelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa oleh pemerintah desa di parakanmangu kecamatan Parigi	Metode kuantitatif	Secara umum pengelolaan APBDes sudah terkelola dengan sangat baik. Akan tetapi terdapat hambatan dalam pengelolaan APBDesnya yaitu perangkat desa kesulitan dalam proses penyusunan APBDes karena dananya turun dari pemerintah

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1				sehingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan sebelumnya. ini disebabkan oleh kebijakan yang berubah-ubah sehingga muncullah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan APBDes.
2	Iqsan (2016) Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No. 1	Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa longnah kecamatan muara anlong kabupaten kutai timur	Metode penelitian deskriptif dan dianalisis secara kuantitatif	Penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Di desa long nah kecamatan muara anlong kabupaten kutai timur menunjukkan bahwa sudah terlaksana dengan sangat baik
3	Afriyanto dan Kurrohman (2014) jurnal riset akuntansi dan keuangan vol. 2 no. 3	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan jember	Metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif	penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) telah sesuai berdasarkan dengan ketentuan yang sudah ada. Akan tetapi Perlu dilakukan penyempumaan secara berkelanjutan agar sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perkembangan perundang-undangan.sebelumnya. ini disebabkan oleh kebijakan yang berubah-ubah sehingga muncullah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan APBDes
4	Gimon et, al (2018) jurnal riset akuntansi going concern vol 13 no. 2	Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah desa kopandakan 1	Metode kuantitatif	Sistem akuntansi pelaksana APBDes Menunjukkan hasil yang bagus apalagi pada tahun 2016 semuanya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu		desa dan pemendagri No. 113 tahun 2014 serta semuanya sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa
5	Soeharso efra daud (2017) jurnal ilmu pemerintahan vol 4 no 1	Akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 berdasarkan permendagri no. 113 tahun 2014 di kecamatan sedayu kabupatenantul yogyakarta	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	Menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2015 di desa argorejo dandesaargodadi kecamatan sedayu kabupatenantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir.

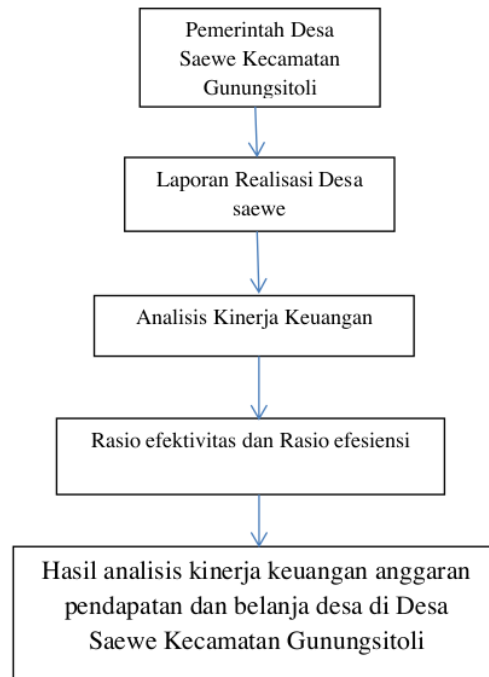
Dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu berfokus pada analisis pelaksanaan, penyusunan, dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dengan menggunakan rasio keuangan desa.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam Syifa & Susi (2020), “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting”. Sedang menurut Suriasumantri dalam Syifa & Susi (2020) “

kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan”.

Berikut gambaran kerangka penelitian yang telah dirangkum oleh peneliti:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data, untuk memperoleh gambaran yang sesuai atau jelas mengenai masalah yang diteliti, sedangkan penelitian kuantitatif adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian. Nurhayati (2019).

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:39) dalam Ilham et.,al 2019 “adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Menurut Abuzar Asra (2017:381) dalam (Arensco et.,al 2023) “variabel tunggal juga disebut dengan indeks tunggal. Indeks atau variabel tunggal hanya membahas satu variabel saja”. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa saewe kecamatan gunungsitoli.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019:126) dalam (Jijah dan Evi 2021) “menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBDes Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli.

Sedangkan sampel menurut sugiyono (2019:127) dalam (Jijah dan Evi 2021) “sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi”. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBDes Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Nani Agustina (2017) merupakan “sebuah alat yang digunakan dalam memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama”.

Jadi, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan lembar observasi dan dokumen berupa laporan realisasi APBDes Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
2. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab terhadap subyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari permasalahan yang sering muncul karena alasan tertentu yang tidak dapat dipaparkan.
3. Dokumentasi yaitu metode yang dilakukan untuk mencari atau mengumpulkan data sekunder agar memperoleh data yang mendukung dalam penelitian ini, misalnya catatan atau laporan keuangan, laporan realisasi, dan lain-lain.

Sementara data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang mana, data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lokasi/objek penelitian melalui

observasi dan wawancara, namun masih memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk dikembangkan sesuai pemahaman peneliti sendiri. Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam (Nuning 2017) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file”.

Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung yang berupa dokumen. Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam (Nuning 2017) adalah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah laporan realisasi APBDes Desa Saewe yang telah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Saewe Periode Tahun 2019 hingga Tahun 2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: dengan menggunakan analisis rasio keuangan yakni rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Dimana datanya didapatkan dari laporan realisasi APBDes dan kemudian dilakukan perhitungan yang akan dimuat didalam tabel untuk dianalisis dan dideskripsikan.

3.7 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih sejak bulan April-Agustus 2023. Seperti diuraikan dalam tabel Jadwal pelaksanaan penelitian dibawah ini:

Tabel 3. 1 Jadwal pelaksanaan penelitian tahun 2023

No	Kegiatan	Jadwal				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan judul	■				
2	Penyusunan proposal		■	■		
3	Konsultasi kepada dosen pembimbing		■	■		
4	Persiapan seminar				■	
5	Seminar penelitian				■	
6	Persiapan penelitian					■
7	Pengumpulan data					■
8	Penulisan naskah skripsi					■
9	Konsultasi kepada dosen pembimbing					■
10	Penyempurnaan naskah					■
11	Penulisan dan penyempurnaan skripsi					■
12	Ujian skripsi					■

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Saewe adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Saewe bahwa sebelum terbentuk satu pemerintah desa di wilayah ini sudah ada tiga nama kampung kecil yang secara adat istiadat berdiri sendiri dan masing-masing sudah ada penatua adatnya, kampung-kampung tersebut yaitu: Saewe, Hambawa, dan Lasara Hambawa pada saat itu berada di bawah kendali pemerintahan Ori Ulu (Tuhenori) menggabungkan ketiga kampung adat itu menjadi satu pemerintahan desa dan nama desanya diambil dari salah satu nama kampung yang ada pada saat itu, yaitu Saewe tanpa melihat keberagaman yang telah ada, padahal seyogyanya nama desa harus melalui kesepakatan serta penggabungan dari ketiga nama kampung yang sudah ada.

Namun begitu berkuasanya kepala ori pada saat itu, maka semua keputusan yang dikeluarkan harus diterima sehingga sejak saat itu ketiga kampung diatas digabung menjadi satu desa dengan nama desa Saewe. Saewe sendiri berarti tersebar dan banyak berada dimana-mana dan merupakan komunitas yang besar serta dimana setiap pertama kali tinggal keturunan ini maka disana akan terbentuk satu generasi dan bila ingin mengembangkan wilayah maka salah satu keluarga akan pindah ketempat tersebut namun daerah yang ditinggalkan tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan salah satu keturunan harus tinggal dan menetap.

Kampung adat Saewe menurut perkiraan terbentuk pada tahun 1901 pada masa itu kepala kampungnya (Salawa/ yang

dituakan) yaitu Balugu Awuwukha kemudian dilanjutkan oleh Balugu Simeziwatuha yang diangkat langsung oleh Kepala Ori Ulu karena masa itu masih berlaku yang namanya Ori yang saat ini setara dengan kecamatan. Masa kepemimpinannya terbilang lama yaitu, berakhir pada tahun 1920 setelah itu diangkat kembali oleh kepala Ori (Tuhenori) sebagai Kepala Kampung Saewe yaitu Balugu Sagobanua dan berakhir masa kepemimpinannya pada tahun 1925, setelah itu oleh kepala negeri lagi mengangkat Tarufa Telaumbanua menjadi kepala kampung hingga tahun 1940, pada masa inilah kampung Saewe terbelah dua yaitu muncul kampung Ombolata (perkumpulan kita) tepatnya pada tahun 1927, kampung ombolata ini merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Ombolata ulu.

Setelah masa kepemimpinan Tarufa telaumbanua berakhir pada tahun 1940 maka kemudian diangkat kembali kepala kampung yaitu ama Raina telaumbanua kepemimpinannya berakhir pada tahun 1955, setelah itu pada tahun 1955 diangkat ama Ratia Telaumbanua menjadi kepala kampung juga oleh Tuhenori, pada masa inilah salah satu program dari pemerintah Ori yang nama pejabatnya Tuhenori diubah menjadi Kecamatan yang nama pejabatnya yaitu Camat begitu juga dengan kampung, kampung yang sudah dirubah namanya menjadi Desa.

Maka sejak saat itu penyebutan nama untuk wilayah yang berada dibawah kecamatan (Ori) adalah desa, karenanya pada saat itu ada tiga kampung yang digabung menjadi 1 (satu) desa yaitu kampung Saewe, kampung Hambawa, kampung Lasarahambawa dengan nama desa yaitu desa Saewe, Kemudian masa kepemimpinan kepala desa Ama Ratia Telaumbanua berakhir pada tahun 1962. Setelah tahun 1962 kemudian diangkat Ama Waulu Telaumbanua menjadi kepala desa, lalu pada tahun 1970 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama di desa Saewe dan yang terpilih juga yaitu Ama Waulu Telaumbanua, dan baru berakhir

masa kepemimpinannya pada tahun 1979, setelah berakhir masa jabatan Ama Waulu Telaumbanua kemudian diangkat kembali kepala desa yaitu Sarododo Lase oleh Camat melalui musyawarah desa, masa jabatannya berakhir pada tahun 1981.

Dari tahun 1981 diangkat Sokhifao Lase menjadi kepala desa masa jabatannya berakhir pada tahun 1985 pada masa inilah tapak balai desa Saewe yang sudah ada saat ini dihibahkan kepada pemerintah desa yang dihibahkan oleh orang tua kades Sokhifao Lase yaitu an.Siduhu Lase (Ama Zokhi Lase) dan pada masa kades ini juga dihibahkan sebidang tapak untuk pemerintah daerah yang dijadikan sebagai lokasi Koni. Tahun 1985 diadakan pemilihan kepala desa dan terpilihlah Tehe'aro Lase (Ama Gayasa) menjadi kepala desa Saewe dan beliau meninggal pada tahun 1990. Pada masa ini juga dihibahkan sebidang tanah lagi untuk pemerintah daerah yang bersebelahan langsung dengan tanah yang sudah dihibahkan terlebih dahulu pada masa kepala desa Sokhifao Lase dan digunakan untuk Koni, setelah kepala desa Tehe'aro Lase meninggal maka sekretaris desa diangkat menjadi Pj. Kepala desa yaitu Atoni Telaumbanua, tidak lama setelah itu Atoni Telaumbanua meninggal pada tahun 1992, pada tahun 1992 juga diangkat kembali Pj. Kepala desa yaitu Faigizaro Lase dan masa jabatan Faigizaro Lase berakhir pada tahun 1998, pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa dan terpilihlah Sokhiaro Telaumbanua, masa jabatan Sokhiaro Telaumbanua berakhir pada tahun 2007.

Kemudian pada tahun 2007 diadakan kembali pemilihan kepala desa Saewe, pemilihan kepala desa pada masa ini adalah pemilihan paling demokratis dan panas sebab ada 5 (lima) orang calon dan semuanya punya potensi masing-masing menyampaikan visi dan misi bila menjabat sebagai kepala desa. Namun pada akhirnya pada saat diadakan pemilihan yang terpilih adalah Yulianus Lase dan hingga RPJMdes ini disusun beliau masih

menjabat sebagai kepala desa saewe. Pada masa ini banyak perubahan dan kemajuan dibanding dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya bahkan lebih banyak perkembangan dibanding dengan desa-desa tetangga pada masa ini. Setelah berakhir masa jabatan kepala desa saewe Yulianus Lase selanjutnya diteruskan oleh Pj. Kepala desa Yawazaro Telaumbanua, S.Pd di mulai sejak akhir tahun 2014 sampai akhir tahun 2015 Oleh karena masa jabatan Pj. Kepala desa hanya berlaku sampai 1 (satu) tahun.

Maka pemerintah daerah kembali mengangkat Pj. Kepala desa yang baru atas nama Baziduhu Lase S.Pd yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihunjuk langsung oleh kepala daerah atau Wali Kota Gunungsitoli. setelah berakhir masa jabatan Pj kepala desa atas nama Baziduhu Lase S.Pd, Dilaksanakan pemilihan kepala desa defenitif periode 2016 s/d 2022 dan terpilihlah kepala desa yang baru atas nama Tongoni Zai dan masa jabatannya berakhir pada tanggal 24 november 2022 sampai RKPdes ini dibuat untuk rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan. Selanjutnya, pemerintah daerah kembali mengangkat Pj kepala desa yang baru atas nama Verdinand Mosinema Telaumbanua S.Pd yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dihunjuk langsung oleh Kepala Daerah atau Wali kota Gunungsitoli untuk memimpin pemerintah desa Saewe sampai saat ini.

Tabel 4.1
Sejarah Perkembangan Desa

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1901	Terbentuknya kampung saiwe yang pertama kali yang di pimpin kepala kampung pertama yaitu balugu awuwukha bersamaan dengan terbentuknya kampung saewe terbentuk juga kampung hambawa dan lasarahambawa	Banyaknya warga desa yang pindah keluar desa akibat dari buruknya kondisi ekonomi di desa
1927		Kampung saiwe pecah menjadi 2 (dua) yaitu terbentuk satu perkumpulan namanya

		OMBELATA,yang diakibatkan karena perkelahian besraudara pada saat pesta perkawinan salah seorang warga hanya karena memperebutkan bembagian adat
1964		Terjadi wabah kolere penyakit talu soyo banyak warga meninggal dunia
1967		PKI masuk kenias dan banyak warga yang terlibat dan pada saat itu langsung diberantas sehingga banyak warga yang dibunuh
1967	Gereja BNKP Mo'awo didirikan	
1974	SDN Inpres saewe didirikan	
2005		Terjadi gempa bumi di kepulauan nias, tak terkecuali desa saewe pada saat itu selain korban meninggal warga sebanyak 6 (enam) orang ratusan orang terluka berat ringan, pada umumnya waktu itu rumah rumah warga rusak ,ada yang kategori ringan berat dan rusak total. Untuk rumah rusak total ada sebanyak 75 unit, rusak berat sebanyak 200 unit.
2008	Pembangunan laangan futsal di lapangan pramuka permohonan ke help jerman.	
2008	Pembangunan jalan kenari berupa rabat beton sepanjang 700 m dari anggaran PNPM – MP	
2009	Pembebasan lahan tapak balai pertemuan Desa Saewe	
2009	Pembangunan MCK dilahan tapak balai pertemuan desa saewe anggara daei APBD TA 2009	
2009	Pembangunan sarana air bersih di dusun 3 sekaligus pembangunan PAH di dusun 1 dan melakukan rehabilitasi di mata air sumur gg. Sumur dari program CWSH (ADB)	
2010	Pembangunan jalan rabat beton di dusun 3 sepanjang 750 mbersamaan dengan pembangunan rabat beton di jalan menuju SD saewe sepanjang 50 m dari anggaran PNPM-MP	
2010	Pembentukan FKPM Desa Saewe	
2011	Pembukaan dan pengaspalan	

	jalan ewalida yang dimulai dari jalan golkar sepanjang 600 m anggaran APBD TA 2011	
2011	Pengaspalan jalan cancer sepanjang 300 m anggaran APBD 2011	
2012	Pembangunan gedung balai pertemuan desa saewe anggaran PNPB-MP 2011	
2012	Pembukaan badan jalan kolam sekaligus pengerasan sepanjang 500 m anggaran padat karya 2012	
2013	Pembangunan dengan pengerasan jalan ewalida menuju kolam anggaran PNPB-MP 2013	
2013	Pengaspalan jalan kolam anggaran PNPB-MP 2013	
2013	Lanjutan pembangunan rabat beton jalan kenali dana DPDK	
2014	Pembangunan tembok penahan dijalan frondrako di depan dan samping rumah ina rossi lase dana DPDK	
2014	Pembukaan dan pengerasan jalan dari dusun III menuju desa hilihao dan PNPB-MP	
2014	Pengaspalan jalan yos sudarso lama belakang gudang karet dan APBD	
2014	Pengaspalan jalan cancer menuju GOR dan APBD	
2015	Pembangunan rabat beton di jalan beo gang mo'oho dana dari APBD	
2015	Pembangun drainase (parit beton) di jalan beo gang Mo'oho dana APBD	
2015	Pembangunan parit beton dekat gang sumur dari APBD	
2016	Pembangunan di dusun III dana DD TA 2015 penurunan dan perbaikan jalan frondrako	
2016	Pengaspalan jalan saehil di dusun III dana APBD	
2016	Lanjutan pengaspalan jalan kolam menuju jalan ewalida dan APBD	
2017	Peningkatan pembangunan, perkerasan dan tembok jalan penahan desa kenari desa saive	

	kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli DD tahun 2017 sebesar 60%	
2017	Pematangan lahan kantor desa Saewe dusun II alokasi dana desa tahun anggaran 2017 sebesar 30%	
2018	Pengaspalan jalan PAUD rasni	
2018	Pembangunan parit beton dari rumah A.Berti Gulo menuju naga Saewe	
2018	pembangunan rabat beton dari jalan elang depan rumah A. Clara tel menuju laut	
2018	Lanjutan pembangunan parit beton dan tembok penahan jalan kolam.	
2018	Lanjutan pembangunan parit beton di belakang balai desa lama	
2018	Pembangunan parit dibelakang dan sepanjang gang Mo'oho	
2018	Perlindungan mata air di belakang balai pertemuan	
2018	Peningkatan pembangunan pengerasan jalan, parit dan tembok penahan jalan kenari dusun I desa Saewe	
2018	Lanjutan pembangunan kantor desa Saewe	
2019	Pembangunan jalan rabat beton dari jalan yossudarso menuju gereja pemulihan	

2019	Pengaspalan jalan fondrako di dusun III desa Saewe serta pembangunan bangunan pendukung berupa TPT	
2020		Indonesia dan seluruh daerah di indonesia termasuk desa Saewe dilanda wabah Covid- 19
2020	Pembangunan jalan rabat beton dari jalan elang 1 (satu) menuju gang keluarga dusun 1 desa Saewe	
2020	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa gorong-gorong,selokan pembangunan plat duiker di jalan pramuka 1 (satu)	
2020	Pembangunan dijabanisasi desa saewe (jamban)	
2020	Pembangunan jabanisasi didesa saewe (septictank + bak peresapan)	
2020	Pembangunan jambanisasi di desa saewe (jamban dan septictank + bak peresapan)	
2020	Pengerasan (jalan fangoroda) dari jalan ewalida (depan rumah ama david tel) menuju jalan baru +605 mtr	
2021	Lanjutan pembangunan jambanisasi di desa saewe (septictank)	
2021	Pembangunan jamabanisasi di desa saewe (jamban dan septictank +bak peresapan).	

4.1.2 Demokrasi

Penduduk desa saewe mayoritas berpenduduk pribumi (asli) dan ada 2 (dua) kelompok warga yang mendominasi yaitu marga telaumbanua dan marga lase. Kedua marga inilah yang asli (pribumi) dan ada marga lain yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Nias yang sudah lama menjadi warga bahkan ada juga warga yang berasal dari daerah batak dan jawa namun jumlahnya tidak banyak.

Masyarakat lain yang sudah lama menjadi penduduk Desa Saewe antara lain berasal dari Namohalu, Teluk Dalam, Sirombu, Mandrehe, Gomo, Alasa, Alo'oa dan bahkan ada juga masyarakat yang berasal dari desa tetangga seperti Sifalaete Ulu, Ombolata Ulu, Moawo, dan Onowaembo. Sebagian besar masyarakat Desa Saewe beragama Kristen Protestan dan sebagian Khatolik dan beberapa Islam serta Budha.

Pada zaman dahulu di desa ini sangat kentara dengan sifat saling membantu dan sifat bergotong-royong namun pada saat ini kebiasaan yang baik ini sudah berubah sekitar 90% karena disebabkan oleh berbagai faktor terutama banyaknya warga pendatang yang notabene berkeadaan dan tidak mau tahu dengan kegiatan desa sehingga hal ini menular kepada penduduk asli.

Kemudian perkembangan teknologi dan kemajuan di bidang ekonomi yang timpang juga turut mempengaruhi perubahan sifat-sifat masyarakat desa saewe yang saat ini lebih mementingkan diri sendiri (egonya tinggi) daripada kepentingan umum. Desa Saewe mempunyai jumlah penduduk 2.020 jiwa yang terdiri dari laki-laki 981 jiwa perempuan 1039 jiwa, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun.

4.1.3 Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sarana dan prasarana umum desa Saewe secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1	Balai Pertemuan Desa	1 unit	Dusun II
2	PAUD	2 unit	Dusun I, II
3	Gereja	4 unit	Dusun 1, II
4	SD Negeri	1 unit	Dusun I
5	Gor Bulu Tangkis	1 unit	Dusun I
6	Tempat Penampungan Air	2 unit	Dusun II, III
7	Tempat Pemakaman Umum	2 unit	Dusun I, III
8	Jalan Tanah	1	Dusun II
9	Gang	20	Semua Dusun
10	Jalan Poros/Hot mix	4	Dusun 1, II
11	Jalan Aspal Penetrasi	1 unit	Dusun 1, II
12	Sumur Bor	200	Dusun 1, II
13	Rabat Beton Sepanjang 700 M Jalan Kenari	2 unit	Dusun I, III
14	Gedung Balai Pertemuan Desa Saewe	1 unit	Dusun II
15	Pengaspalan Jalan Ewalida Yang Dimulai Dari Jalan Golkar Sepanjang 600 M	600 m	Dusun I
14	Pengaspalan Jalan Cancer	300 m	Dusun I
15	Jalan Kolam Sekaligus Pengerasan	500 m	Dusun II
16	Pembangunan Di Dusun III Dana DD TA 2015 Penurunan Dan Perbaikan Jalan	154 m	Dusun III

	Fondrako		
17	Peningkatan pembangunan, perkerasan dan tembok penahan jalan Kenari Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli DD tahun 2017 60%	790 m	Dusun I
18	Pengaspalan Jalan PAUD Rasni	55 m	Dusun II
19	Pembangunan Parit Beton Dari Rumah A Berti Gulo Menuju Naga Saewe	60 m	Dusun I
20	Pembangunan Rabat Beton Dari Jalan Elang Depan Rumah A, Clara Tel Menuju Laut	55 m	Dusun I
21	Lanjutan Pembangunan Parit Beton Dan Tembok Penahan Jalan Kolam	172 m	Dusun II
22	Lanjutan Pembangunan Parit Beton Di Belakang Balai Desa lama	36 m	Dusun II
23	Pembangunan Parit Dibelakang Dan Sepanjang Gang Mo'oho	102 m	Dusun II
24	Perlindungan Mata Air Dibelakang Balai Pertemuan	1 unit	Dusun II
25	Peningkatan Pembangunan, Pengerasan Jalan, Parit Dan Tembok Penahan Jalan Kenari Dusun I Desa Saewe	790 m	Dusun I
26	Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Saewe	1 unit	Dusun II

27	Pembangunan Jalan Rabat Beton Dari Jalan Yossudarso Menuju Gereja Pemulihan	1 unit	Dusun I
28	Pengaspalan Jalan Fondrako Serta Pembangunan Bangunan Pendukung Berupa TPT	413 m	Dusun III
29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa. Gorong-Gorong, Selokan Dan Pembangunan Plat Duiker Dijalan Pramuka 1 (Satu)	88 m	Dusun I
30	Pengerasan Jalan Fangaroda Dari Jalan Ewalida Depan Rumah A. Davit Tel Menuju Jalan Baru	613 m	Dusun I
31	Pembangunan Jambanisasi Di Desa Saewe	2 unit	Dusun I, II
32	Pembangunan Jambanisasi Di Desa Saewe (Septitank+Bak Peresapan)	23 unit	Dusun I, II, III
33	Pembangunan Jambanisasi Di Desa Saewe (Jamban Dan Septictank+Bak Peresapan)	50 unit	Dusun I, II, III

8

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa saewe secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula. Sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, nelayan, buruh tani, perkebunan karet sebagian kecil. Sedangkan di

sektor formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri dan lain-lain.

4.2 Kondisi Pemerintah Desa

4.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah desa saewe dibagi menjadi 3 (tiga) dusun dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus. Jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Sedangkan pusat desa berada di dusun II (dua) dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun.

Desa saewe terletak dalam wilayah kecamatan gunungsitoli, kota gunungsitoli provinsi sumatera utara yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa mo'awo dan desa hilihao kecamatan gunungsitoli.
2. Sebelah timur berbatasan dengan laut nias dan desa ombolata ulu kecamatan gunungsitoli.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan desa fadoro lasara dan kelurahan saombo kecamatan gunungsitoli.
4. Sebelah barat berbatasan dengan desa sifalaete ulu kecamatan gunungsitoli.

Luas wilayah desa saewe adalah 900 Ha dimana 50% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 20% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berupa tempat tanaman kakao, karet, kelapa, dan tanaman palawija. Sedangkan 30% lainnya sebagai tempat pemukiman.

Iklim desa saewe sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung bagi maju mundurnya tingkat perekonomian masyarakat terutama petani dan nelayan yang ada di desa saewe kecamatan gunungsitoli.

4.2.2 Visi Dan Misi Desa Saewe

Adapun visi dan misi desa saewe diantaranya yaitu:

Visi:

visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi desa Saewe adalah: “Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna tercapainya masyarakat yang sejahtera, sehat, cerdas, berdaya saing, berbudaya, aman, dan berakhlak mulia”.

Misi:

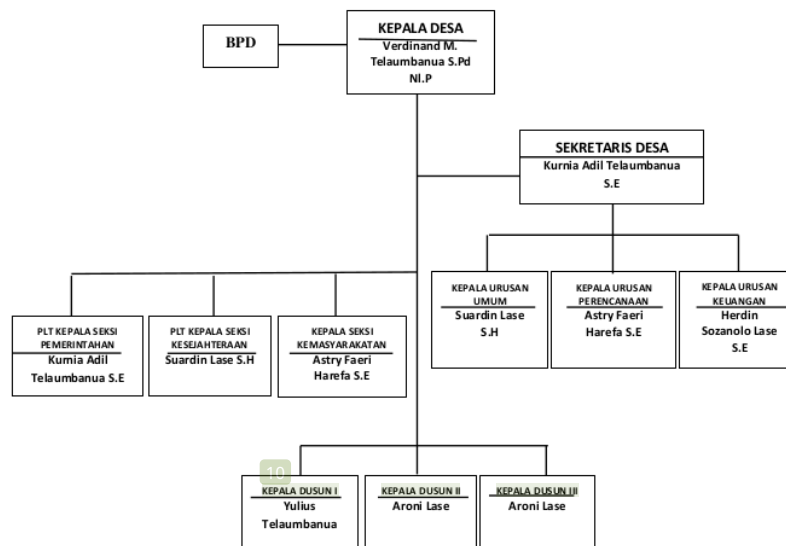
- a) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta membina hubungan kerja sama antara desa
- b) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan benar.
- c) Pembangunan yang berkesinambungan dan merata dengan mengedepankan skala prioritas berbasis gotong-royong
- d) Menjaga ketentraman dan kenyamanan di lingkungan desa.
- e) Meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat, tatanan hidup bersih, serta lingkungan yang asri.
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui industri rumah tangga serta kelompok tani, nelayan, serta mewujudkan badan usaha milik desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan di desa
- h) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa saewe.
- i) Mendorong dan mengembangkan kegiatan pemuda dalam berorganisasi melalui wadah karang taruna sebagai tonggak pembangunan desa.

- j) Melanjutkan program-program yang telah di laksanakan oleh pemerintah desa saewe periode lalu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes desa saewe.

4.2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur organisasi desa saewe kecamatan gunungsitoli menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Saewe



Struktur organisasi pemerintahan desa saewe adalah sebagai berikut:

1. Susunan pemerintah desa Saewe tahun 2023

Tabel 4.5
Pemerintah Desa Saewe Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintahan	L/P	Ket
1	Verdinand M. Telaumbanua S.Pd NI.P	Pj. Kepala Desa	L	
2	Kurnia Adil Telaumbanua	Sekretaris Desa	L	

	S.E			
3	Suardin Lase S.H	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	L	
4	Astry Faeri Harefa S.E	Plt. Kepala Urusan Perencanaan	P	
5	Herdin Sozanolo Lase S.E	Kepala Urusan Keuangan	L	
6	Kurnia Adil Telaumbanua S.E	Plt Kepala Seksi Pemerintahan	L	
7	Suardin Lase S.H	Plt Kepala Seksi Kesejahteraan	L	
8	Astry Faeri Harefa S.E	Kepala Seksi Kemasyarakatan	P	
9	Yulius Telaumbanua	Kepala Dusun I	L	
10	Aroni Lase	Plt Kepala Dusun II	L	
11	Aroni Lase	Kepala Dusun III	L	

2. Susunan Badan Permusyawaratan Desa Saewe Tahun 2023

Tabel 4.6
Pemerintah Desa Saewe Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Dalam BPD	L/P	Ket
1	Baziduhu Lase S.Pd	Ketua	L	
2	Sumardin Lase	Wakil Ketua	L	
3	Saridini Telaumbanua S.Pd	Sekretaris	P	
4	Bazisokhi Telaumbanua	Anggota	L	
5	Yulianus Lase S.Pd	Anggota	L	
6	Hatoli Lase	Anggota	L	
7	Temasokhi Lase	Anggota	L	

4.2.4 Tugas Dan Fungsi

Dalam pemerintahan desa, tentunya ada kepala desa yang memegang kekuasaan tertinggi dan di bantu oleh perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Berikut ini ada beberapa tugas dan fungsinya yaitu:

1. Sekretaris desa

Tugas sekretaris desa adalah membantu kepala desa dalam hal administrasi dan salah satu fungsinya adalah

melaksanakan urusan tata usaha seperti menyiapkan tata naskah dinas, arsip, administrasi surat menyurat, dan ekspedisi.

2. Kepala urusan

Kepala urusan terdiri dari tiga dan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda yaitu

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum, salah satu fungsinya melaksanakan urusan ketatausahaan seperti pengadministrasi surat menyurat, tata naskah dinas, arsip, dan ekspedisi. Sedangkan salah satu tugasnya adalah melaksanakan urusan surat menyurat.
- b. Kepala urusan keuangan, salah satu fungsinya yaitu melaksanakan urusan kebendaharaan seperti prngurusan administrasi keuangan. Sedangkan salah satu tugasnya adalah menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran dan belanja desa.
- c. Kepala urusan perencanaan, salah satu fungsinya yaitu mengordinasikan urusan seperti menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Sedangkan salah satu tugasnya yaitu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa.

3. Kepala seksi

Kepala seksi terdiri dari tiga dan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda yaitu

- a. Kepala seksi pemerintahan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. Sedangkan salah satu tugasnya melaksanakan administrasi kependudukan.
- b. Kepala seksi kesejahteraan, salah satu fungsinya adalah melaksanakan pembangunan sarana prasarana

pedesaan. Sedangkan salah satu tugasnya adalah melaksanakan dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.

c. Kepala seksi pelayanan, memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Sedangkan salah satu tugasnya adalah melaksanakan evaluasi dan melaorkan kegiatan pembinaan mental spiritual.

4. Kepala dusun

Kepala dusun memiliki salah satu fungsi yaitu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dalam pengelolaan wilayah. Sedangkan tugasnya membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas kegiatan kepala desa di dusun.

4.3 Temuan Penelitian

Dalam bab IV ini peneliti membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, analisa data dan pembahasan penelitian. Adapun data yang di dapatkan oleh peneliti yaitu laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2019-2022 di desa saewe kecamatan gunungsitoli.

Dari data yang di dapatkan peneliti menemukan beberapa temuan yaitu: yang pertama, sumber pendapatan desa saewe berasal dari pendapatan transfer oleh pemerintah kota gunungsitoli di antaranya dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa. Dari tahun 2019-2022 setiap tahunnya desa saewe memiliki sisa anggaran. Penyebabnya masih ada program yang belum terealisasi secara maksimal. Yang kedua, sisa anggaran yang tidak di realisasikan/digunakan pada tahun 2019, akan kembali di gunakan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 begitu pun tahun-tahun seterusnya.

9 Berikut adalah tabel anggaran pendapatan, anggaran belanja, realisasi pendapatan, dan realisasi belanja desa tahun 2019-2022 di desa saewe:

Tabel 4.7

Anggaran Pendapatan Dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan
2019	1.638.464.345,00	1.640.571.083,00
2020	1.384.227.970,00	1.384.227.970,00
2021	1.398.889.604,00	1.398.889.604,00
2022	1.542.476.166,00	1.542.080.956,00

Sumber: laporan realisasi APBDes desa Saewe (diolah penulis,2023)

Tabel 4.8

Anggaran Belanja Dan Realisasi Belanja Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2019	1.727.535.941,77	1.322.038.445,46
2020	1.791.832.204,31	1.734.991.721,50
2021	1.459.317.844,55	1.141.415.114,17
2022	1.710.801.548,00	1.524.592.628,00

Sumber: laporan realisasi APBDes desa Saewe (diolah penulis,2023)

Berdasarkan tabel 4.7 menggambarkan bahwa anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan di desa saewe kecamatan gunungsitoli dari tahun 2019-2022 memiliki selisih yang tidak begitu besar bahkan tahun 2020 dan 2021 memiliki anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang sama. Akan tetapi jika di lihat tabel 4.8 anggaran belanja dan realisasi belanja tahun 2019-2022 memiliki selisih yang begitu jauh. Ini di sebabkan karena ada beberapa program yang belum terealisasikan atau terpenuhi oleh pemerintahan desa.

4.4 Analisa Hasil Penelitian

Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa periode tahun 2019-2022 di desa saewe dengan menggunakan rasio keuangan daerah diantaranya:

a. Rasio efektivitas

Berikut ini perhitungan tingkat efektifitas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli periode tahun 2019-2022:

1. Tahun 2019

Desa Saewe memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.638.464.345,00 pada tahun 2019. Sedangkan realisasi pendapatannya Rp.1.640.571.083,00 pada tahun 2019. Jadi pengukuran tingkat efektifitas pada tahun 2019 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.640.571.083,00}{1.638.464.345,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{100,13\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa efektifitas anggaran pendapatan dan belanja desa di desa saewe kecamatan gunungsitoli tahun 2019 sebesar **100,13 %** dan ini menunjukkan kriteria sangat efektif.

2. Tahun 2020

Desa Saewe memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.384.227.970,00 pada tahun 2020. Sedangkan realisasi pendapatannya masih sama dengan anggaran pendapatannya Rp. 1.384.227.970,00 pada tahun 2020. Jadi pengukuran tingkat efektifitas pada tahun 2020 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.384.227.970,00}{1.384.227.970,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa efektifitas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan

Gunungsitoli tahun 2020 sebesar **100%** dan ini menunjukkan kriteria efektif

3. Tahun 2021

Desa Saewe memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.398.889.604,00 pada tahun 2021. Sedangkan realisasi pendapatannya masih sama dengan anggaran pendapatannya yaitu Rp.1.398.889.604,00 pada tahun 2021. Jadi pengukuran tingkat efektifitas pada tahun 2021 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.398.889.604,00}{1.398.889.604,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{100\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa efektifitas anggaran pendapatan dan belanja Desa Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2021 sebesar **100%** dan ini menunjukkan kriteria efektif.

4. Tahun 2022

Desa Saewe memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.542.476.166,00 pada tahun 2022. Sedangkan realisasi pendapatannya Rp.1.542.080.956,00 pada tahun 2022. Jadi pengukuran tingkat efektifitas pada tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{1.542.080.956,00}{1.542.476.166,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{99,98\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa efektifitas anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2022 sebesar **99,98%** dan ini menunjukkan kriteria efektif.

Tabel 4.10

**Hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di
Desa Saewe Dengan Menggunakan Rasio Efektifitas**

Tahun	Total Anggaran Pendapatan (RP)	Total Realisasi Pendapatan (RP)	Rasio Efektifitas (%)	Kategori
2019	1.638.464.345,00	1.640.571.083,00	100,13%	Sangat Efektif
2020	1.384.227.970,00	1.384.227.970,00	100%	Efektif
2021	1.398.889.604,00	1.398.889.604,00	100%	Efektif
2022	1.542.476.166,00	1.542.080.956,00	99,98%	Efektif

Sumber: laporan realisasi APBDes desa Saewe (diolah penulis,2023)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dengan menggunakan rasio efektifitas periode tahun 2019-2022 masuk dalam kategori efektif karena dari tahun 2019-2022 rasio efektifitasnya rata rata 100%. Dimana di ketahui jika semakin besar nilai efektifitasnya, maka semakin baik kinerja pemerintahannya.

b. Rasio efisiensi

Berikut ini perhitungan tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa saewe kecamatan gunungsitoli periode tahun 2019-2022:

1. Tahun 2019

Desa Saewe memiliki realisasi pendapatan Rp.1.640.571.083,00 pada tahun 2019. Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp. 1.322.038.445.46. Jadi pengukuran tingkat efisiensi pada tahun 2019 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{1.322.038.445.46}{1.640.571.083,00} \times 100\% \\ &= 80,59\% \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan

Gunungsitoli tahun 2019 sebesar **80,59%** dan ini menunjukkan kriteria cukup efisien

2. Tahun 2020

Desa Saewe memiliki realisasi pendapatan Rp. 1.384.227.970,00 pada tahun 2020. Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp. 1.734.991.721,50. Jadi pengukuran tingkat efisiensi pada tahun 2020 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{1.734.991.721,50}{1.384.227.970,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{125,35\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2020 sebesar **125,35%** dan ini menunjukkan kriteria tidak efisien.

3. Tahun 2021

Desa Saewe memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp.1.398.889.604,00 pada tahun 2021. Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp.1.141.415.114,17. Jadi pengukuran tingkat efisiensi pada tahun 2021 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{1.141.415.114,17}{1.398.889.604,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{81,60\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2021 sebesar **81,60%** dan ini menunjukkan kriteria cukup efisien.

4. Tahun 2022

Desa Saewe memiliki realisasi pendapatan Rp.1.542.080.956,00 pada tahun 2022. Sedangkan realisasi belanjanya sebesar Rp.1.524.592.628,00. Jadi pengukuran tingkat efisiensi pada tahun 2022 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi} &= \frac{1.524.592.628,00}{1.542.080.956,00} \times 100\% \\ &= \mathbf{98,87\%} \end{aligned}$$

Jadi, dapat di ketahui bahwa rasio efisiensi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2021 sebesar **98,87%** dan ini menunjukkan kriteria kurang efisien.

Tabel 4.12

Hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Saewe Dengan Menggunakan Rasio Efisiensi

Tahun	Total Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi	Kategori
2019	1.640.571.083,00	1.322.038.445,46	80,59%	Cukup Efisien
2020	1.384.227.970,00	1.734.991.721,50	125,35%	Tidak Efisien
2021	1.398.889.604,00	1.141.415.114,17	81,60%	Cukup Efisien
2022	1.542.080.956,00	1.524.592.628,00	98,87%	Kurang Efisien

Sumber: laporan realisasi APBDes desa Saewe (diolah penulis,2023)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dengan menggunakan rasio efisiensi periode tahun 2019-2022 setiap tahunnya mengalami perubahan. Dimana pada tahun 2019 tingkat efisiensinya 80,59% sehingga masuk kategori cukup efisien. Pada tahun 2020, mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga mencapai angka 125,35% sehingga masuk kategori tidak efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan mencapai angka 81,60%

dengan kategori cukup efisien. Dan terakhir tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan angka 98,87% sehingga masuk kategori kurang efisien.

4.5 Pembahasan

Hasil analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli periode tahun 2019-2022 dengan menggunakan rasio keuangan daerah di antaranya rasio efektifitas dan rasio efisiensi dapat di ketahui sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas

Hasil analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan menggunakan rasio efektifitas di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli, menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dimana, berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitasnya selama 4 periode semuanya masuk dalam kategori sangat efektif dan efektif. Mulai dari tahun 2019, mendapatkan hasil presentase sebesar **100,13%** sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Ditahun 2020 mengalami sedikit penurunan dimana hasilnya sebesar **100%** sehingga masuk kategori efektif. selanjutnya pada tahun 2021 hasilnya sama dengan tahun 2020 sebesar **100%** sehingga masuk kategori efektif. Dan terakhir pada tahun 2022 mendapatkan hasil sebesar **99,98%** dan masih tergolong kategori efektif. Disini dapat dilihat bahwa dari tahun 2019-2022 setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang begitu jauh. Sehingga hasil presentasi rasio efektifitasnya selama 4 periode masuk dalam kategori efektif karena yang mana di ketahui bahwa hasil perhitungan rasio efektifitasnya mencapai **100%** dan ini menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat tinggi. Artinya selama 4 tahun pemerintah desa telah melaksanakan dan telah berusaha dengan baik dalam penggunaan anggarannya.

2. Rasio efisiensi

Hasil perhitungan analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa Di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli dengan menggunakan rasio efisiensi periode tahun 2019-2022, selalu mengalami

perubahan. Dimana, hasilnya tidak menentu setiap tahunnya seperti pada tahun 2019 tingkat rasio efisiensinya mencapai **80,59%** sehingga masuk dalam kategori cukup efisien. Selanjutnya pada tahun 2020, tingkat efisiensinya mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar **125,35%** Ini menunjukkan kategori tidak efisien. Hal ini di sebabkan karena ada beberapa program yang belum terealisasikan pada tahun 2019, sehingga kembali di realisasikan pada tahun 2020 serta adanya penambahan program dimana pemerintah desa melaksanakan pembangunan desa dan penanggulangan bencana. Pembangunan desa mulai dari pembangunan jalan, pengerasan jalan, pembangunan peningkatan prasarana jalan, pembangunan jambanisasi, dan lain-lain. Sedangkan pada penanggulangan bencana mulai dari kegiatan penanggulangan dan belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat (BLT-DD). Sehingga pada tahun 2020 pemerintahan desa melakukan pengeluaran atau belanja desa lebih dari pendapatan yang di terima. Pada tahun 2021 tingkat efisiensinya kembali mengalami penurunan dengan hasil **81,60%**. Sehingga masuk kategori cukup efisien. Terakhir tahun 2022 menunjukkan tingkat efisiensi sebesar **98,87%** sehingga masuk kategori kurang efisien. Hal ini juga di sebabkan karena peningkatan anggaran di bidang penanggulangan bencana darurat melebihi dari tahun tahun sebelumnya.

3. Terlepas dari hasil perhitungan rasio efektifitas yang sangat memuaskan dan hasil perhitungan rasio efisiensi yang tidak begitu baik, ternyata pada tahun 2019-2022 pelaksanaan program-program pada Desa Saewe masih banyak yang belum terealisasikan sehingga menimbulkan adanya SILPA setiap tahunnya. Di mulai dari tahun 2019 pada tahun ini banyak program yang belum terealisasikan yang terbagi dalam 3 bidang yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, terdapat 5 program yang belum terealisasikan yaitu program kursus pelajaran umum pada pelajar, program pengembangan dan pembinaan sanggar seni/belajar, program

pelatihan bina keluarga balita (BKB), program pelatihan bina keluarga remaja (BKR), dan program pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan, pembangunan dwiker plat di jalan pramuka 1 (satu) dan parit di jalan pramuka menuju parit di belakang rumah A.Siji Lase). Pada bidang kemasyarakatan desa terdapat 2 program yang belum terealisasi yaitu program sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa (pembangunan lapangan bola volly di jalan ewalida dusun I Desa Saewe) dan program pembinaan LKMD/LPM/LPMD (operasional LPM). Selanjutnya pada bidang pemberdayaan masyarakat terdapat 4 program yang belum terealisasi yaitu program bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk perikanan darat/nelayan (pembuatan rumpon), program bimtek/pelatihan/pengenalan TTG untuk pertanian/perternakan, program pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan (pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak stunting) dan program pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan dilaksanakan oleh Pemdes). Dari banyaknya program yang tidak terealisasikan tersebut maka terdapat SILPA sebesar Rp.405.497.496,31

Pada tahun 2020, pemerintah Desa Saewe dalam pelaksanaan anggaran belanja sudah dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga program-program yang telah direncanakan hampir terealisasikan secara maksimal. Akan tetapi pada tahun 2020 juga masih terdapat 4 program yang belum terealisasi yaitu pertama, pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu program pelaksanaan dan sosialisasi penjangkaran dan penyaringan perangkat desa. Kedua, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu program pelatihan pendidikan bagi masyarakat (pelatihan komputer). Ketiga pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yaitu program pelatihan pengelolaan BUMDes dan keempat, pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yaitu belanja tidak terduga. oleh karena adanya program yang masih belum terealisasikan pada tahun 2020 maka terdapat SILPA sebesar Rp. 56.840.482,81.

Pada tahun 2021, masih terdapat program yang sudah di anggarkan namun belum terealisasi secara maksimal dan tidak mencapai target anggaran yang telah di tentukan di antaranya yaitu pertama, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tepatnya pada sub bidang kawasan pemukiman, kedua pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak tepatnya pada sub bidang keadaan mendesak (BLT-DD). Ketiga, pada bidang pemberdayaan masyarakat desa tepatnya pada sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Akibat program yang belum terealisasi secara maksimal tersebut Sehingga terdapat SILPA sebesar Rp.318.325.382,00. Akan tetapi program dan bidang lain pada tahun 2021 sudah terealisasi secara maksimal.

Pada tahun 2022, sama seperti pada tahun 2021 dimana terdapat program yang sudah di anggarkan namun belum terealisasi secara maksimal dan tidak mencapai target anggaran yang telah di tentukan diantaranya yaitu pertama, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa tepatnya pada sub bidang kesehatan dan sub bidang kawasan pemukiman. Kedua pada bidang pemberdayaan masyarakat tepatnya pada sub bidang pemberdayaan perempuan. Hal ini menyebabkan, adanya SILPA sebesar Rp.186.208.920,00. Akan tetapi program dan bidang lain pada tahun 2022 sudah terealisasi secara maksimal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya SILPA disebabkan oleh banyaknya program yang belum terealisasi secara maksimal bahkan ada program yang sama sekali tidak dicapai atau dijalankan. Akan tetapi SILPA yang tidak digunakan pada tahun 2019 tersebut ditambahkan pada realisasi pendapatan pada tahun 2020 untuk kembali digunakan dan dilaksanakan begitu pun tahun-tahun seterusnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak pemerintah Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli telah berusaha memberikan dan melakukan yang terbaik

dalam pencapaian setiap program yang telah direncanakan. Akan tetapi sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada pemerintah desa yaitu sekretaris desa, ia menyatakan bahwa adanya program yang belum terealisasi dari tahun 2019-2022 karena disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama disebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan anggaran atau transfer anggaran dari Pemerintah Kota Gunungsitoli ke rekening Kas Desa (RKD) dimana rata-rata baru dicairkan pada akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terlambat dan bahkan tidak tercapai. Yang kedua, disebabkan oleh keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja APBDes dimana penetapannya dilaksanakan diatas bulan Mei tahun berkenaan hal ini berpengaruh pada terhambatnya dalam pelaksanaan maupun kegiatan. Yang ketiga, seperti diketahui pada tahun 2019 adanya kebijakan dan peraturan pemerintah terutama pada saat pandemi *covid-19* dimana adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan sehingga program yang dianggarkan pada tahun tersebut dan tahun selanjutnya tidak dapat direalisasikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan dari hasil kajian efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang begitu jauh. Pada tahun 2019, memiliki tingkat efektifitas terbesar yaitu 100,13% sehingga masuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dari tahun 2019 tapi tidak begitu jauh selisihnya yaitu sebesar 100% sehingga masuk kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021 namun juga tidak jauh selisihnya yaitu sebesar 99,98% sehingga masuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2019-2022 dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Saewe telah melaksanakan kewajibannya dalam mewujudkan tingkat efektifitas kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan semaksimal mungkin.
2. Efisiensi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 selalu mengalami perubahan. Dimulai pada tahun 2019 memiliki tingkat efisiensi sebesar 80,59% dengan kategori cukup efisien. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu sebesar 125,35%, sehingga masuk kategori tidak efisien. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 81,60% dengan kategori cukup efisien. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar

98,87% sehingga masuk kategori kurang efisien. Pada tahun 2019 dan tahun 2021 memiliki kriteria cukup efisien yang menunjukkan pemerintah Desa Saewe sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penggunaan anggarannya meskipun hanya masuk dalam kategori cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022 memperoleh kriteria tidak efisien dan kurang efisien karena di pengaruhi oleh penggunaan anggaran yang tidak maksimal. Jadi, dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Saewe selama 4 periode yaitu dari tahun 2019-2022 belum melaksanakan atau mewujudkan tingkat efisiensi kinerja keuangan dan belanja desa dengan baik dan maksimal dalam pemerintahannya.

3. Adanya SILPA setiap tahunnya di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli karena banyaknya program yang belum terealisasi yang di sebabkan oleh keterlambatan dalam pencairan anggaran atau transfer anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli ke rekening kas desa (RKD) dimana rata-rata baru dicairkan pada akhir tahun yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan terlambat dan bahkan tidak tercapai, juga disebabkan oleh keterlambatan dalam penetapan anggaran pendapatan dan belanja APBDes dimana penetapannya dilaksanakan diatas bulan Mei tahun berkenan hal ini berpengaruh pada terhambatnya dalam pelaksanaan maupun kegiatan, dan pada tahun 2019 adanya kebijakan dan peraturan pemerintah terutama pada saat pandemi *covid-19* dimana adanya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan sehingga program yang dianggarkan pada tahun tersebut dan tahun selanjutnya tidak dapat direalisasikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian, maka saran yang di ajukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk tingkat efektifitas kinerja keuangan anggaran penndapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019-2022

sudah masuk dalam kategori efektif. Jadi, untuk kedepannya diharapkan kepada pemerintah Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli untuk mempertahankan hasil kinerjanya tersebut dalam mewujudkan efektifitas anggaran pendapatannya atau bahkan di tingkatkan lagi agar masuk dalam kategori sangat efektif dalam setiap tahunnya.

2. Untuk tingkat efisiensi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli tahun 2019-2022 masih mencakup kategori kurang efisien. Jadi untuk kedepannya di harapkan kepada pemerintah Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli unuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya, dan mengurangi program-program yang tidak dapat dicapai pada tahun tersebut sehingga pada tahun selanjutnya kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa dapat mencapai kategori sangat efisien.
3. Untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan untuk memberi perhatian yang lebih kepada setiap desa di seluruh Indonesia terutama dalam mempercepat pencairan anggaran sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat berjalan lancar dan terealisasi secara maksimal sehingga tidak ada SILPA yang tersisa setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafii, & Dr. Dra. Kismartini, M.Si 2020. Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Pembangunan. *Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*.
- Arenco Juandrel Turang, Anthonius M. Golung, Yuriewaty Pasoreh. 2023. Manfaat Klasifikasi Bahan Pustaka Di UPT Perpustakaan Untuk Temu Kembali Informasi Bagi Pengguna Khususnya Mahasiswa UNSRAT. *Jurnal Arta Diurna Komunikasi* Vol.5 No. 1 2023
- Azizah Widyastuty Harahap, Mas`ut, Jalilah Ilmiha, Syamsul Effendi 2021. Analisis Growth Ratio, Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma* Vol 8, No. 1 2021.
- Chabib Soleh, & Heru Rochmansjah 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus Media.
- Cristian D. Sumual, Lintje Kalangi, Natalia Y.T Gerunggai 2017. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akutansi Going Concern* 12(2), 2017.
- Deni Wahyu Eka Wijaya, & Diah Ayu Septi Fauji 2021. Determinan Kinerja Nganjuk. *Jurnal Of Law, Administration, and Social Science* vol 1 No. 2, Desember 2021.
- Desy Dwi Ayu Lestari, Intan Bunga Pertiwi, Muhammad Muchlisun, Nur Kabib, Saiful Anwar 2020. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi Sosial & Humaniora*. Vol. 01 No. 09. April 2020.
- Diah woro Ayuningtyas 2020. Penerapan *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 5, No. 1, (2020).

- Eka Fitri Ayu & Yulistia 2020. Efisiensi Dan Efektifitas Anggaran Dan Realisasi Belanja Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Durian Tarung Padang. *Pareso Jurnal* Vol. 2, No. 4 Desember 2020.
- Ester Tamallo 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Hotel Grand Asia Di Makassar. *AkMen Jurnal Ilmiah* vol. 15 No 1 (2018).
- Gramini. M., Kasim, M.Y, & Bidin , C.R. 2017. Analisis Kinerja Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali pada Periode 2011-2015. *Jurnal Ilmu Manajemen, (online)* Vol. 4 No. 1.
- Ilham Agustian, Harius Eko Saputra, Antonio Imanda 2019. Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di PT. Jasaraharja Putra Cabang Bengkulu. *Jurnal Professional FIS UNIVED*.Vol.6 No.1 Juni 2019
- Isnah Mar`atus Sholikhah, & Novi Khoiriawati 2022. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Analisis *Value For Money*. *Journal Of Business, Management and Accounting* Volume 4, No 1, Juli-Desember 2022.
- Jijah Hilyatul Ajjah, & Evi Selvi 2021. Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Perangkat Desa. *Jurnal Manajemen* Vol.13 (2) 2021.
- M. Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri 2020. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Bayuasin). *Jurnal Ekonomica Sharia* Volume 5 No 2 Edisi Februari 2020
- Nani Agustina 2017. Mengukur Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Pada SMP Uswatun Hasanah Jakarta. *Jurnal Paradigma* Vol. 19, No. 1, Maret 2021.
- Ni Kadek Diksi Anugeraheni, & Gede Adi Yuniarta 2022. Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng

Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol 13 No. 2 Tahun 2022.

Nico Finandi Asnawi, Bambang Suhada, M. Ihsan Dacholfany 2019. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No 73 Tahun 2020 Di Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Program Studi Magister Manajements, Universitas Muhammadiyah Metro*.

Nuning Indah Pratiwi 2017. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal ilmiah dinamika sosial* Vol 1 Nomor 2 Dinamika Sosial

Nurhayati 2019. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bonto Tengnga Kabupaten Sinjai. *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar* (2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Syifa Vidya Sofwan, & Susi Octaviyanti 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Periode 2010-2018. *Jurnal Ilmiah Akutansi* Vol 11, No 3 hlm 115-130 September-Desember 2020.

Wida Puspawardani 2017. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol 4 No. 1 (2017).

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SAEWE KECAMATAN GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 123dok.com 6%
Internet Source

2 repository.unej.ac.id 2%
Internet Source

3 jurnal.unigal.ac.id 1%
Internet Source

4 repository.unmuhjember.ac.id 1%
Internet Source

5 jurnal.uisu.ac.id 1%
Internet Source

6 repo.uinsatu.ac.id 1%
Internet Source

7 ejurnal-unespadang.ac.id 1%
Internet Source

8 repository.uin-suska.ac.id 1%
Internet Source

repository.unibos.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

ANALISIS KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SAEWE KECAMATAN GUNUNGSITOLI

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60
